

Editorial: Youth Digital Activism, Public Policy and Clientelism

Editorial: Aktivisme Digital Kaum Muda, Kebijakan Publik dan Klientelisme

Luthfi Makhasin

Mencari dan menemukan benang merah dari berbagai fenomena sosial politik kompleks dan acak adalah soal yang tidak mudah tapi menantang untuk dilakukan. Aktivisme digital kaum muda, kebijakan publik dan klientelisme adalah benang merah yang menghubungkan artikel yang dipublikasikan di edisi kali ini. Aktivisme digital adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kaum muda saat ini. Lebih dari sekedar sumber informasi, kaum muda telah menjadi ‘penghuni asal’ dunia digital (native digital) dengan segala kompleksitas yang melingkupinya. Pemahaman yang lebih baik atas aktivisme digital kaum muda akan membantu kita memahami lebih baik interaksi dinamis antara kaum muda, teknologi dan gerakan sosial.

Berbeda dengan aktivisme digital kaum muda, kebijakan publik mencakup tahapan panjang mulai dari penentuan agenda, formulasi, implementasi sampai dengan evaluasinya. Pengetahuan mendalam setiap tahapan dalam kebijakan publik membantu kita memahami kompleksitas teknis dan administratif terkait dengan problem komunikasi dan koordinasi yang masih menjadi persoalan laten di Indonesia. Lebih dari itu, kebijakan seringkali juga tidak hanya melibatkan aspek makro dan lembaga pemerintah tapi juga melibatkan level kelembagaan yang lebih rendah dengan ruang lingkup yang lebih terbatas.

Sedangkan dalam konteks relasi kuasa, terminologi kemunduran demokrasi yang mengemuka sekarang ini seringkali mengabaikan partikularitas

politik di level tingkat lokal. Bertahannya aktor politik lama dengan sumber daya kultural keagamaan dan material ekonomi makin meneguhkan karakterisasi Indonesia sebagai tipikal demokrasi yang tidak semata prosedural dan formal tapi juga klientelistik. Klientelisme dalam pengertian penggunaan jejaring politik yang lebih personal daripada kelembagaan menarik ditelisik lebih jauh. Relasi patron-klien yang terus bertahan dalam ruang kesempatan politik yang terdesentralisasi saat ini menawarkan cara pandang yang lebih bernuansa dan mendalam daripada kerangka berpikir kemunduran demokrasi dalam melihat wajah politik Indonesia hari ini.

Gerakan Anak Muda dan Aktivisme Digital

Dinamika sosial kultural dan politik hari ini sangat ditentukan oleh beberapa variabel penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu anak muda, media sosial, dan teknologi. Interaksi ketiganya membentuk tidak hanya identitas individual tapi juga dinamika gerakan anak muda yang memicu perubahan sosial skala besar (Earl and Kimport 2011, Gerbaudo 2011, Lim 2013). Menjelaskan hubungan ketiganya bisa menjadi fondasi penting membaca trend baru gerakan sosial yang berpusat di anak muda dengan media sosial sebagai saluran utamanya (Lim 2014).

Artikel Nur Amala Saputri menelaah wacana pendisiplinan ketubuhan perempuan dalam musik visual TikTok. Penulis menggunakan paradigma kritis dengan meminjam analisis tekstual. Objek kajian yang dianalisis adalah konten yang dipublikasikan oleh Idgitaf dan Mahalini dalam kanal TikTok resmi milik mereka. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Sara Mills. Penulis menemukan dua poin utama, yaitu adanya idealitas perempuan aktif dan interaktif melalui fitur Duet Challenge. Fitur TikTok mengusung ideologi partisipatif yang justru memaksa para musisi perempuan untuk selalu tampil interaktif dan aktif kepada penontonnya. Perempuan dituntut untuk patuh, harus tetap menjaga keaktifan dan interaktifnya (atraksinya) untuk menjadi muda karena hal inilah yang menjadi daya tarik perempuan. Kedua, penulis menemukan adanya wacana kecantikan imajiner dalam musik visual TikTok yang dimanifestasi melalui variasi filter dan template yang telah disediakan TikTok secara langsung menjadi mode pengaturan pendisiplinan tubuh Mahalini untuk mengkonstruksi imej dirinya sebagai

perempuan yang memiliki kecantikan imajiner, melebihi kecantikan perempuan dalam realitas nyata kehidupan.

Sementara itu, tulisan Anggi Koenjaini Putri menggunakan teori gerakan sosial khususnya pembingkaihan (*framing*), struktur mobilisasi dan kesempatan politik untuk menjelaskan munculnya perlawanan terhadap kekerasan seksual di Timteng dan Afrika Utara di media sosial X atau dulu dikenal dengan twitter. Gerakan Me Too telah mempengaruhi dinamika sosial dan politik di wilayah MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), di mana budaya patriarki dan tabu seputar kekerasan seksual masih kuat. Melalui tagar seperti #AnaKaman, #Masaktach, dan #MosqueMeToo, perempuan di wilayah ini mulai menantang norma sosial yang membatasi kebebasan dan kesetaraan gender. Kontradiksi dalam feminisme di Timur Tengah mencerminkan pertempuran antara tradisi dan modernitas, agama dan budaya. Bertentangan dengan persepsi publik di banyak negara di Barat, perdebatan dan kontradiksi feminisme dan Islam masih hidup di sana.

Gerakan #MeToo di MENA menunjukkan framing seruan perubahan yang jauh lebih mendalam daripada perempuan yang mendapatkan akses ke peluang ekonomi atau partisipasi politik. Melalui ini mereka berusaha untuk mengurangi pengaruh patriarki pada masyarakat, menghilangkan sikap menyalahkan korban, menempatkan tanggung jawab yang seharusnya pada pelaku. Gerakan #MeToo di wilayah ini menghadapi tantangan khusus dalam menavigasi norma-norma sosial yang kuat dan mempengaruhi perubahan perilaku dan persepsi masyarakat.

Gerakan Me Too di MENA memunculkan diskusi tentang transformasi norma sosial, pembagian kekuasaan simbolik, dan pergeseran budaya dalam masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, gerakan tersebut bertujuan untuk menghasilkan perubahan substantif dalam perlakuan terhadap kekerasan seksual dan ketidaksetaraan gender. Struktur sosial gerakan Metoo berkontribusi pada transformasi politik di MENA. Dalam beberapa kasus, seperti di UEA, Turki, Lebanon, Mesir, Iran, Yordania, dan Arab Saudi menunjukkan bahwa keleluasaan di legislatif yang mendukung hak-hak perempuan, didukung oleh upaya online, dapat dicapai. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan amandemen, rancangan Undang-Undang dan pencabutan aturan yang selama ini merugikan pihak perempuan. Dengan demikian, gerakan

sosial Me Too di wilayah MENA tidak hanya memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual, tetapi juga menantang struktur kekuasaan patriarki dan norma sosial yang membatasi kebebasan dan kesetaraan gender. Dengan menggunakan media sosial sebagai alat utama, gerakan ini telah menginspirasi perubahan dalam cara masyarakat memandang dan menanggapi isu-isu diskriminasi gender.

Kolaborasi dan Komunikasi Kebijakan

Selain gerakan anak muda, kebijakan juga merupakan subjek kajian yang selalu menarik dibahas. Diskusi tentang kebijakan baik di level organisasi atau pemerintahan, maupun dalam skop lokal, nasional dan regional membantu kita memahami bahwa kebijakan adalah ranah kajian yang luas dan multi dimensi. Tiga tulisan tentang pelaksanaan program CSR, kebijakan publik di sektor pertahanan dan program kerjasama antar kota yang diterbitkan di edisi kali ini mewakili pembahasan tentang problem penting dalam kolaborasi, komunikasi dan koordinasi dalam kebijakan publik (Dunn 2017, Canary and Taylor 2020).

Anjuni Maulia Hartantri dan Tundjung Linggarwati mengadopsi kerangka berpikir Triple Bottom Line dan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan pelaksanaan CSR perusahaan teknologi asal Korea Selatan di Banjarnegara. Program Samsung Tech Institute turut berkontribusi pada meningkatnya keterampilan teknologi anak muda khususnya siswa sekolah menengah atas. Peningkatan keterampilan teknologi ini meningkatkan peluang pekerjaan dan kesempatan berwirausaha yang relevan di dunia industri. Perencanaan yang dilakukan secara terstruktur, baik dalam perumusan tujuan, strategi, maupun kebijakan membuat tujuan program dapat tercapai dan memberikan manfaat baik bagi perusahaan ataupun masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia kerja. Tulisan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR adalah wujud kolaborasi dan sinergi yang baik pemerintah terutama di bidang pendidikan dengan sektor swasta.

Terkait dengan komunikasi kebijakan, tulisan Aris Sarjito mengeksplorasi hambatan dalam koordinasi dan komunikasi antara administrasi publik dan sektor pertahanan. Tulisan ini mengungkapkan tantangan besar yang menghambat kolaborasi yang efektif, dan menekankan

perlunya saluran komunikasi yang lebih baik. Strategi untuk meningkatkan transfer pengetahuan dan keahlian antara administrasi publik dan sektor pertahanan dibahas. Studi ini mengidentifikasi kurangnya saling pengertian sebagai hambatan utama dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi kesenjangan ini. Sebagai kesimpulan, tulisan ini menekankan pentingnya membina hubungan yang lebih kuat antara administrasi publik dan sektor pertahanan untuk meningkatkan keamanan nasional dan pemerintahan yang demokratis. Tulisan ini didasarkan pada data sekunder untuk menilai efektivitas menjembatani kesenjangan tersebut.

Sedangkan tulisan Aminatus Soleha dkk. mengeksplorasi motif-motif di balik kerja sama antara Malang dan Fuqing, Tiongkok. Tulisan ini menemukan 2 (dua) motif utama yang mendasari kerjasama antar kota di tingkat regional, yaitu kesamaan dalam sektor pendidikan dan pertanian, bagi terjadinya kerjasama antara Kota Malang di Jawa Timur dan Kota Fuqing di China. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa kerja sama antara Malang dan Fuqing didorong oleh kebutuhan dan potensi yang nyata di kedua kota tersebut. Penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan tentang kerja sama antar kota melalui kaca mata motif kerja sama. Implikasi dari tulisan ini memiliki dampak signifikan dalam memperkuat pemahaman tentang dinamika kerja sama antar kota serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam memajukan pembangunan lokal.

Klientelisme dan Orang Kuat Lokal

Menguatnya gejala kemunduran demokrasi di tingkat global dan khususnya Indonesia telah menjadi topik konsisten dalam banyak reportase lembaga/media internasional seperti Freedom House dan The Economist. Namun demikian, pandangan tentang kemunduran demokrasi ini agak bias karena menekankan pada aspek erosi kebebasan sipil tapi cenderung mengabaikan aspek lain seperti partisipasi dan kesetaraan. Dalam diskusi soal kemunduran demokrasi, politik Indonesia hari ini dicirikan oleh kuatnya jejaring klientelisme dan distribusi patronase (Berenschot 2018, 1-31) yang ditopang oleh kuatnya cengkeraman orang kuat (Migdal 1988; Sidel 1999). Dua tulisan yang membahas tentang politik lokal di dua wilayah Indonesia, yaitu Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Kuningan di Jawa Barat mewakili karakterisasi politik

Indonesia yang klientelistik, yaitu politik yang dibangun dari jejaring yang bersifat personal dan informal berbasis keagamaan atau patronase ekonomi.

Peran agama khususnya Islam dalam politik adalah fenomena yang selalu menarik diamati di Indonesia karena posisinya sebagai salah satu contoh demokrasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun secara ideologis bukanlah kekuatan politik dominan, demokrasi Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari dinamika politik Muslim pada umumnya dan khususnya peran ulama/tokoh agama dalam kontestasi elektoral. Sebagian besar studi tentang peran politik ulama biasanya berlatar belakang Jawa yang merupakan populasi Muslim terbesar di Indonesia. Tulisan Alya Rahma dkk tentang pengaruh politik kalangan agamawan dalam kontestasi politik elektoral di Aceh menarik karena menegaskan kembali kuatnya jejaring sosial tradisional elit agama di tingkat lokal.

Sementara itu, artikel yang ditulis Riyana Kristono menggunakan analisis ekonomi politik untuk menjelaskan fenomena muncul dan berkembangnya dinasti politik Aang Hamid Suganda di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dinasti politik merupakan pewarisan kekuasaan politik di antara anggota sebuah keluarga selama beberapa generasi. Tulisan ini menunjukkan bahwa sosok Aang Hamid Suganda (AHAS) merupakan local strongman yang berhasil mentransformasikan pengaruh politik pribadinya menjadi dinasti politik berbasis keluarga. Berbeda dengan Aceh yang mengandalkan basis keagamaan, dinasti politik lokal ini dibangun dari basis material ekonomi. Dinasti politik AHAS menunjukkan bahwa keberhasilan pewarisan kekuasaan dalam sebuah keluarga dapat dilakukan melalui efektifitas strategi politik, prestasi dalam pembangunan daerah, dan kuatnya pengaruh sosial yang diciptakan. Kekuatan figur dan keluarga ini berjaln kelindan dan dalam beberapa hal bahkan menyatu dengan struktur partai politik di tingkat lokal.

Penutup

Ketujuh artikel yang terbit di edisi ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskusi akademik yang lebih serius terkait tema gerakan anak muda dan aktivisme digital, kolaborasi dan komunikasi kebijakan serta politik dan orang kuat lokal. Di tengah kuatnya korporatisasi media di tangan pemilik modal besar, aktivisme digital memberi harapan akan lahirnya gerakan untuk

mendorong perubahan sosial skala kecil dan besar dengan anak muda sebagai pelopor utamanya. Perubahan sosial pada skala luas bagaimanapun mesti dikelola secara sistematis agar dapat menjadi kebijakan yang bermakna. Kebijakan yang bermakna ini hanya dapat tercapai melalui kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi yang intens di antara semua pemangku kepentingan yang ada. Di tengah optimisme menguatnya akvitisme digital dan kolaborasi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan, konteks politik Indonesia sayangnya masih kuat dipengaruhi jejaring klientalisme dan patronase yang tidak hanya ditemukan di level nasional tapi memiliki kecenderungan menguat juga di tingkat lokal.

Hormat kami,

Luthfi Makhasin

Editor

Daftar Pustaka

- Canary, Heather E, & Taylor, Julie L. (2020). 'Policy communication. Engaging multiplicity' dalam Mary John O'Hair (editor). *The Handbook of Applied Communication Research*, Wiley Blackwell Chapter 37.
- Dunn, William N. 2017. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. London: Routledge.
- Earl, J.-&-K, Kimport. 2011. *Digitally Enabled Social Change: Activism in the Internet Age*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Gerbaudo, Paolo. 2011. *Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism*. London: Pluto Press
- Lim, Merlyna. 2013. *The Internet and Everyday Life in Indonesia: A New Moral Panic?*. *Bijdragen tot de Taal Landen Volkenkunde* 169 (1), 133-147
- _____. 2014. *Seeing spatially: people, networks and movements in digital and urban spaces*. *International development planning review* 36 (1), 51-72
- Sidel, John T. 1999. *Capital, Coersion and Crime: Bossism in the Philippines*, Stanford: Stanford University Press.
- Berenschot, Ward. 2018. *The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy*", dalam *Comparative Political Studies*, p. 1-31.
- Migdal, Joel, S. 1988. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton, Princeton University Press.